

Rencana Pemulihan

Dampak COVID-19 terhadap Kebebasan Media, Keselamatan Jurnalis dan Kelangsungan Media di Asia Tenggara



Pendahuluan

Selama pandemi COVID-19 terungkap bahwa tantangan jurnalis di Asia Tenggara semakin meningkat. Mereka menghadapi hambatan khususnya dalam menjalankan tugas melakukan peliputan, keamanan dan keselamatan jurnalis di tengah ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka secara menyeluruh, serta kelangsungan operasional media. Upaya menggali dan merumuskan langkah konkrit untuk mendukung jurnalis sebagai bagian dari rencana pemulihan media di Asia Tenggara sangat diperlukan.

Draf rencana pemulihan ini dibuat sebagai bagian dari proyek riset “Dampak COVID-19 terhadap Kebebasan Media, Keselamatan Jurnalis dan Kelangsungan Media di Asia Tenggara” yang dilakukan oleh Public Media Alliance (PMA) bekerja sama dengan Asia Democracy Network (ADN) dengan dukungan UNESCO Bangkok dan UNESCO International Programme for The Development of Communication (IPDC). Merujuk pada hasil penelitian tersebut, rancangan rekomendasi ini disusun untuk tingkat regional, mencakup langkah-langkah meningkatkan kebebasan media, kelangsungan media dan keselamatan jurnalis di Asia Tenggara.

Rencana pemulihan tersebut menggabungkan

beberapa poin kunci yang muncul dari riset PMA dan masukan dari stakeholder media di wilayah ini.

Hal tersebut termasuk:

- ▶ Mendirikan forum (non-pemerintah) tingkat regional untuk mempromosikan kesejahteraan, keselamatan dan kebebasan jurnalis
- ▶ Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar-negara terkait media
- ▶ Mengkaji dampak digitalisasi, terutama dampak sosial media
- ▶ Membangun kerja sama yang lebih kuat untuk memproduksi konten berkualitas dan efisien dari aspek biaya
- ▶ Memperkuat dukungan publik – mendukung peningkatan literasi media digital, meningkatkan kemampuan publik untuk membedakan disinformasi dan berita yang terdistorsi.

Rancangan rencana ini dapat digunakan sebagai model untuk meningkatkan kerja sama strategis media di seluruh Asia Tenggara, dan meningkatkan kemampuan media untuk memperkuat kapasitas melakukan pemulihan serta menjaga keberlanjutan selama dan setelah pandemi.

1. Kebebasan Media

- ▶ Melindungi, mengkampanyekan dan melakukan advokasi kebebasan serta independensi media di kawasan ini, melalui dukungan pengenalan undang-undang dan kebijakan yang mendukung kebebasan media. Serta membangun mekanisme yang mumpuni seperti lembaga, program dan dana untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terkait ancaman, pelecehan dan kekerasan terhadap jurnalis.
- ▶ Memastikan media layanan publik berjalan efektif, independen dan akuntabel
- ▶ Mendukung media alternatif untuk memastikan mereka dapat melengkapi kerja media arus utama independen dan mengisi kesenjangan informasi.
- ▶ Kampanye literasi media digital untuk mencegah mis- dan disinformasi
- ▶ Meminta organisasi di level regional dan internasional yang mendukung demokrasi untuk membantu media independen dan organisasi terkait di kawasan ini.
- ▶ Membangun dan mempertahankan solidaritas regional di antara media independen untuk mengkampanyekan kebebasan pers dan melakukan aksi bersama yang diperlukan

2. Kelangsungan Media

- ▶ Eksplorasi model bisnis dan pendanaan baru yang dapat membantu memastikan kelangsungan dan keberlanjutan media di masa krisis. Hal ini termasuk merespon perubahan pola perilaku pembaca.
- ▶ Menjamin kesejahteraan pekerja media, termasuk menyiapkan jaminan sosial, perlindungan mental dan fisik yang memadai.
- ▶ Mengampanyekan pluralisme dan keragaman media untuk melawan konsentrasi kepemilikan media.
- ▶ Memperkuat training keterampilan media yang akan membantu dalam memfasilitasi media melakukan peralihan ke media digital, serta menghasilkan peliputan yang lebih baik dan efektif.
- ▶ Diversifikasi dan meningkatkan strategi konten untuk memastikan dan mempertahankan keterlibatan pembaca.
- ▶ Meningkatkan keamanan digital yang menguntungkan bagi media dan audiens.

3. Keselamatan Jurnalis

- ▶ Mendesak negara untuk mencabut undang-undang yang mengizinkan ancaman terhadap media dan membenarkan kekerasan terhadap jurnalis.
- ▶ Menyerukan pemberlakuan undang-undang dan kebijakan lain yang menjamin keselamatan jurnalis serta narasumber, selama dan setelah krisis apapun.
- ▶ Melakukan kajian prosedur keselamatan dan risiko di organisasi media termasuk peningkatan kapasitas untuk menjamin keselamatan jurnalis dan narasumber.
- ▶ Membangun mekanisme di level manajemen media untuk memastikan dukungan yang memadai bagi jurnalis selama menghadapi krisis.
- ▶ Mengakui peran jurnalis sebagai pekerja di garis depan sekaligus memberi perlindungan serta layanan yang mereka butuhkan.

Editor: Tess Bacalla dan Laxman Datt Pant

Gambar sampul: klenova / istock

Peta vektor: twenty1studio / Shutterstock.com



Dipublikasikan oleh: Public Media Alliance
© Public Media Alliance 2021

Ide dan pendapat dalam publikasi ini adalah pendapat penulis sesuai dengan penelitian terkait; tidak berkaitan langsung dengan UNESCO, Public Media Alliance atau Asia Democracy Network

PMA menyampaikan terima kasih kepada para penulis dan mitra yang berkontribusi. PMA juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada UNESCO Bangkok dan UNESCO IPDC atas dukungannya.